

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014).

Untuk mengemban amanat undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah memerlukan dukungan dari aparatur pemerintah yang professional, tangguh, dan mampu bersaing secara global. Oleh sebab itu pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa perlu memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing (Jaitun, 2013).

Kualitas sumber daya manusia yang bermutu merupakan salah satu penunjang dalam meningkatkan produktivitas kinerja suatu instansi pemerintahan. Oleh karena itu sumber daya manusia yang berkompentensi tinggi dapat mendukung tingkat kinerja dalam melaksanakan tugas yang telah di tetapkan. Dengan penilaian maka akan diketahui sebaik apa kinerja mereka agar nantinya bisa di evaluasi lebih lanjut. Hal ini dapat digunakan oleh instansi sebagai pertimbangan dalam penilaian.

Berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri bahwa sebagai mana yang dimaksud penilaian prestasi bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.

Perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian hasil, dan manfaat yang dicapai. Adapun kriteria penilaian perilaku kerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4b meliputi Orientasi pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerja sama, dan Kepemimpinan.

Pada Pemerintahan desa di Kecamatan Sebangau Kuala penilaian kinerja masih dilakukan secara subyektif atau berdasarkan pendapat pribadi dalam mengetahui capaian/progress kinerja dari setiap masing-masing pegawai. Saat ini belum ada system yang di gunakan untuk penilain Kinerja pegawai di Kecamatan sebgau kuala. Dalam penelitian ini sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah di atas indikator penilaian kinerja terdiri dari 6 (Enam) faktor penting dalam mengetahui kualitas dari setiap Pegawai tersebut antarlain yaitu Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitemen, Disiplin, Kerja sama, dan Kepemimpinan. Karena ada beberapa faktor penilaian yang saling berpengaruh maka akan sulit untuk mengambil sebuah keputusan.

Ada beberapa Metode yang terdapat pada system pendukung keputusan yaitu Metode SAW, Metode WP, Metode AHP, Metode Fuzzy, Metode Topsis, Metode Register Linear, Metode MFEP, Metode ARAS, Metode BORDA dan Metode ROC. Salah satunya adalah metode Multifactor Evaluation Process (MFEP), dimana metode ini mudah dipahami, dapat mengahsilkan nilai bobot terhadap alternatif dan mampu memberikan keputusan secara objektif.

Pada sistem pendukung keputusan ini penulis menggunakan metode *Multi factor Evaluation Process* (MFEP). Metode ini di pilih karena mampu mengetahui hasil perangkingan dan hasil nilai total bobot pada setiap alternatif. Dengan perhitungan ini diharapkan dapat mengetahui hasil yang akurat dalam penilaian. Maka dari itu penulis mengangkat judul **“Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintahan Desa Menggunakan Metode Multi Factor Evaluation Process (Mfep) Di Kecamatan Sebangau Kuala Kalimantan Tengah”**.

1.2 Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang di peroleh adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana menerapkan metode MFEP dalam penilaian kinerja Pegawai Pemerintahan desa di kecamatan sebangau kaula?
2. Bagaimana membangun system pendukung keputusan pada penilaian kinerja Pegawai Pemerintahan desa di kecamatan sebangau kaula ?

1.3 Batasan Masalah

Dalam perancangan Sistem Pedukung Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintahan Desa Menggunakan Metode *Multifactor Evaluation Process* di Kecamatan Sebangau Kuala ini diberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Sistem ini dibangun sebagai pendukung keputusan untuk mempermudah bagi petugas di kecamatan sebangau kuala dalam penilaian berdasarkan faktor dan bobot kriteria yang telah ditentukan oleh pihak pimpinan (Camat).
2. Sistem Pendukung Keputusan ini dibangun berbasis web dengan menggunakan metode *Multifactor Evaluation Process*.
3. Sistem Pendukung Keputusan ini hanya berfokus untuk penilaian Kinerja Pegawai Pemerintahan Desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan Metode MFEP dalam penilaian Kinerja Pegawai Pemerintahan desa di kecamatan sebangau kaula.
2. Membangun system pendukung keputusan pada penilaian kinerja Pegawai Pemerintahan desa di kecamatan sebangau kaula.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan Informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pada penilaian Kinerja Pegawai Pemerintahan desa.

2. Memberikan Kemudahan dalam penilaian Kinerja Pegawai Pemerintahan desa di kecamatan sebangau kaula.
3. Meberikan hasil yang efektif dan akurat dalam penilaian kinerja Pegawai Pemerintahan desa di kecamatan sebangau kaula